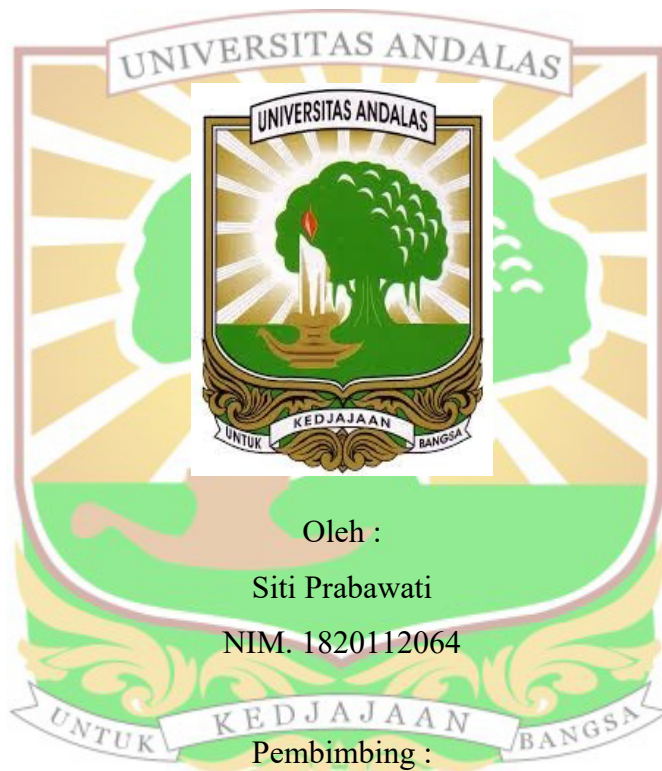


TESIS

**PENERAPAN PROGRAM ASIMILASI BERUPA KERJA SOSIAL
TERHADAP NARAPIDANA KORUPSI :**

Studi Kasus Di Wilayah Hukum Rumah Tahanan Negara Kelas II B Padang

Diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum



Oleh :

Siti Prabawati

NIM. 1820112064

Pembimbing :

1. Prof. Dr. Elwi Danil, SH, MH
2. Dr. Aria Zurnetti, SH, M.Hum

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

2020

**PENERAPAN PROGRAM ASIMILASI BERUPA KERJA SOSIAL
TERHADAP NARAPIDANA KORUPSI :
Studi Kasus Di Wilayah Hukum Rumah Tahanan Negara Kelas II B Padang**

Siti Prabawati

Fakultas Hukum Universitas Andalas

Jl.Pancasila No.10, Padang

E-mail: siti.prabawati@gmail.com

ABSTRAK

Rumah Tahanan Negara (Rutan) merupakan tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun dengan adanya narapidana khususnya korupsi di Rutan Kelas II B Padang merupakan suatu ketidaksesuaian peruntukan tempat untuk melakukan pembinaan. Pembinaan melalui program asimilasi berupa kerja sosial merupakan suatu bentuk integrasi kepada masyarakat. Pembauran narapidana berupa program asimilasi merupakan suatu hal yang sulit dilakukan, khususnya pada kasus tindak pidana korupsi. Hal ini mengingat tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang mengakibatkan kerugian yang besar bagi Negara atau masyarakat. Adapun peraturan yang mengatur dalam penerapan asimilasi adalah Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasasyarakatan, Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut pertama, bagaimanakah penerapan program asimilasi berupa kerja sosial terhadap narapidana korupsi di wilayah hukum Rutan Kelas II B Padang. Kedua, apakah kendala yang dihadapi pada proses program asimilasi berupa kerja sosial terhadap narapidana korupsi di wilayah hukum Rutan Kelas II B Padang. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Adapun hasil dari penelitian tersebut dapat diperoleh kesimpulan yakni, Rutan Kelas II B Padang telah melaksanakan program asimilasi bagi narapidana korupsi berupa kerja sosial, hanya saja program tersebut dalam penerapannya belum terlaksana seluruhnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kendala yang dihadapi adalah sosialisasi mengenai hak-hak dan kewajiban bagi tahanan dan narapidana yang kurang, tidak adanya anggaran pembinaan, kondisi over kapasitas di Rutan Kelas II B Padang, terdapat sikap tidak antusias dari beberapa narapidana dalam mengikuti program asimilasi, sulitnya mencari pihak ketiga untuk bekerja sama, rendahnya pengawasan terhadap pembinaan asimilasi, standar pengamanan terhadap program pembinaan asimilasi yang belum ada, adanya ketidakseragaman nota kesepahaman bersama.

Kata Kunci : Program Asimilasi, Narapidana, Korupsi

**IMPLEMENTATION OF ASSIMILATION PROGRAM IN THE FORM
OF SOCIAL WORK AGAINST CORRUPTION PRISONERS :
Case Study In The Jurisdiction Of State Detention Center
In Padang Class Iib**

Siti Prabawati

Fakultas Hukum Universitas Andalas

Jl.Pancasila No.10, Padang

E-mail: siti.prabawati@gmail.com

Abstract

State Detention House is the place where a suspect or defendant is detained during the investigation, prosecution, and examination process at the court hearing according to Article 1 number 2 Government Regulation Number 58 of 2010 concerning Amendment to Government Regulation Number 27 of 1983 concerning the Implementation of the Criminal Procedure Code. However, the existence of prisoners, especially corruption in the Detention Center Padang Class IIB, is an inconsistency used as a place for guidance. Coaching through assimilation programs in the form of social work is a form of integration to the community. Assimilation of prisoners in the form of assimilation program is a difficult thing to do, especially in cases of criminal acts of corruption. This is because the crime of corruption is a crime that results in huge losses to the State. The regulations governing the application of assimilation are Law No. 12 of 1995 concerning Corrections, Government Regulation No.03 of 2018. Based on the above description, the following problems can be formulated first, How is the implementation of the assimilation program in the form of social work on corruption prisoners in the jurisdiction of Class II B Prison in Padang. Second, what are the obstacles faced in the process of assimilation program in the form of social work towards corruption inmates in the Class II B detention area in Padang. The research approach used in this study is empirical juridical. The results of these studies can be concluded that, Class II B Padang Detention Center has implemented an assimilation program for corrupt prisoners in the form of social work, it's just that the program has not been implemented entirely in accordance with applicable law. Constraints experienced were the socialization of the rights and obligations of detainees and prisoners who were lacking, the absence of coaching budgets, the condition of overcapacity in Class II B Detention Centers in Padang.

Keywords: Assimilation Program, Prisoners, Corruption